

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pada hakikatnya terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Oleh sebab itu, masing-masing daerah memiliki kemampuan dalam mendorong proses pembangunan yang berbeda-beda. Dari sini lah tercipta istilah wilayah maju (*developed region*) dan wilayah terbelakang (*undeveloped region*). Ketimpangan antarwilayah ini memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah (Syafrizal, 2022).

Ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Sedangkan pengertian lain, ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kemakmuran dalam perekonomian antara yang kaya dengan yang miskin. Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Nengsih, 2023).

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan dikarenakan adanya perbedaan jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat sehingga mengakibatkan adanya jurang pemisah antara golongan masyarakat atas yang semakin kaya dan golongan masyarakat bawah yang semakin miskin. Sedangkan ketimpangan pendapatan regional adalah ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain (Nengsih, 2023).

Teori ketimpangan wilayah ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumberdaya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah (Sjafrijal, 2018). Ketimpangan dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Ketimpangan antar sektor, yaitu sektor industri dan pertanian.
2. Ketimpangan antar daerah, ketimpangan ini dapat terjadi akibat perbedaan sumber daya yang dimiliki.
3. Ketimpangan antar golongan ekonomi. Ketimpangan jenis ini adalah yang paling berat. Ketimpangan ini sangat mungkin terjadi di dalam sistem perekonomian yang cenderung liberal atau kapitalis.

Menurut (Sukirno, 2020) ketimpangan ini terbagi menjadi 2, yaitu distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan absolut. Distribusi pendapatan relatif merupakan perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan absolut adalah sebuah persentase pendapatan yang dimiliki oleh sebuah penduduk yang pendapatannya mencapai sebuah tingkatan tertentu atau kurang dari batas tingkatan itu. Ketimpangan yang tinggi dan terus meningkat menjadi salah satu faktor penyebab terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Akibat dari ketimpangan itu sendiri adalah terjadinya konflik sosial, ikatan kebersamaan yang mulai rapuh, berhentinya produktivitas buruh bahkan dapat meningkatnya angka kriminalitas. Yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan kondisi demikian akan memengaruhi terhadap proses pembangunan (Wibowo, 2017).

Sejumlah indikator yang digunakan untuk menganalisis *development gap* atau kesenjangan antar kabupaten/kota, provinsi, negara, yaitu:

- a. Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota
- b. Konsumsi rumah tangga perkapita
- c. *Human Development Index* asumsinya, semakin baik pembangunan di suatu wilayah maka semakin tinggi HDInya

- d. Kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dihitung melalui angka distribusi persentase PDRB baik berdasarkan harga yang berlaku maupun berdasarkan harga konstan
- e. Struktur Fiskal. Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi, maka pendapatan riil perkapita dan penerimaan daerah (PAD) tersebut juga tinggi.

Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan merujuk pada distribusi yang tidak merata dari total pendapatan nasional di antara berbagai keluarga di dalam suatu negara. Adapun Aguslilim (2016) mendefinisikan ketimpangan pendapatan sebagai ukuran sejauh mana pendapatan didistribusikan secara tidak merata di antara orang atau rumah tangga. Pendapatan dalam hal ini meliputi pendapatan tenaga kerja (seperti upah, gaji, dan bonus), pendapatan modal yang berasal dari dividen, bunga tabungan, sewa dari real estat, serta tunjangan kesejahteraan, pensiun negara, dan transfer pemerintah lainnya. Sementara Amri (2017) menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan mengacu pada seberapa tidak merata distribusi pendapatan di seluruh populasi. Ketimpangan pendapatan bisa mengurangi kesempatan untuk standar hidup yang lebih baik dan masa depan keuangan yang stabil, serta pergolakan politik dan sosial.

Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa para ekonom biasanya membedakan dua ukuran utama dalam distribusi pendapatan untuk tujuan analitis dan kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan personal/ukuran dan distribusi pendapatan faktor fungsional/distributif.

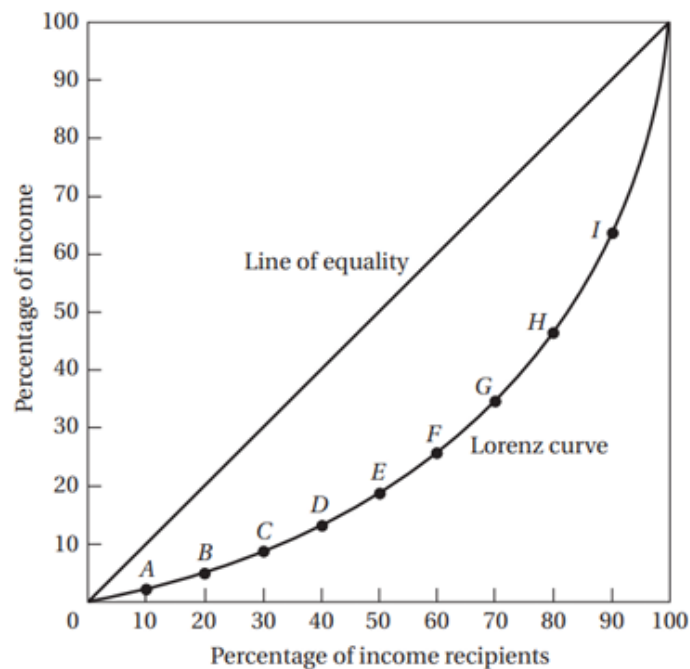
a. Distribusi Ukuran

Distribusi ukuran merupakan distribusi pendapatan yang dilakukan berdasarkan kelas ukuran orang—misalnya, bagian dari total pendapatan yang diperoleh dari persentase spesifik termiskin atau persentase spesifik terkaya dari penghasilannya.

b. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan varian ukuran distribusi pendapatan dari pemerataan sempurna. Bentuk kurva ini bisa dilihat pada Gambar 2.1 di bawah. Pada gambar tersebut, jumlah penerima pendapatan

(secara persentase kumulatif) berada pada sumbu horizontal dan total pendapatan yang diterima oleh setiap persentase penduduk berada pada sumbu vertikal. Kurva Lorenz di bawah menunjukkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dan persentase total pendapatan selama tahun tertentu. Garis diagonal pada kurva ini merepresentasikan kesetaraan sempurna (perfect equality) dalam ukuran distribusi pendapatan. Semakin garis Kurva Lorenz jauh dari garis diagonal maka semakin besar tingkat ketimpangan yang ada, begitu pun sebaliknya.



Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Sumber : Todaro dan Smith, 2015

c. Koefisien gini dan Ukuran Agregat Ketimpangan

Koefisien gini adalah koefisien numerik agregat yang mengukur ketimpangan pendapatan dengan nilai berkisar mulai dari 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna). Koefisien gini diukur secara grafis dengan cara membagi luas antara garis kesetaraan sempurna dan kurva Lorenz dengan luas total di sebelah kanan garis kesetaraan dalam diagram Lorenz. Dengan demikian, semakin tinggi nilai koefisiennya, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi

pendapatannya, begitu pun sebaliknya. Pada umumnya, negara-negara dengan distribusi pendapatan yang sangat tidak merata memiliki nilai koefisien yang berkisar antara 0,50 dan 0,70, kemudian untuk negara-negara dengan distribusi pendapatan yang relatif setara memiliki nilai antara 0,20 hingga 0,35.

d. Distribusi Fungsional

Distribusi pendapatan fungsional berfokus pada persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan kemudian membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang didistribusikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba. Dengan kata lain, jenis distribusi ini berfokus pada faktor-faktor produksi tanpa memperhatikan kepemilikan dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor produksi adalah sumber daya atau input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti tanah, tenaga kerja, dan modal (Amri, 2017).

Menurut (Mugabe, 2018) ada 8 faktor penyebab ketimpangan pendapatan : (1) semakin tinggi pertumbuhan penduduk dan cenderung turunnya pendapatan perkapita (2) inflasi pendapatan masyarakat namun jumlah produksi barang terus meningkat (3) belum meratanya pembangunan antardaerah (4) investasi yang banyak dalam proyek-proyek padat modal (5) rendahnya mobilitas sosial (6) demi kepentingan program pelaksanaan kebijakan industri impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri (7) buruknya nilai tukar bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai sebab ketidak elastisitasnya permintaan negara-negara maju terhadap barang ekspor (8) ancaman terhadap industri kecil (Sholikah, 2022).

Terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dapat memberikan dampak yaitu berupa dampak positif dan dampak negatif (Arsyad, 2020). Positifnya, dapat mendorong daerah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan akan tercapai. Negatifnya, dapat menimbulkan beberapa masalah di antaranya inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi akan dirasa tidak adil. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat juga menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat yang kaya dan yang miskin dan

ketimpangan antarwilayah dapat menimbulkan permasalahan seperti kecemburuan sosial, kerawanan disintegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang semakin tajam dan melebar.

Menurut Anggi Kurnianingsih (2021), mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan disebabkan oleh, sebagai berikut:

- 1) Pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan menurunnya pendapatan perkapita
- 2) Kurangnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
- 3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah
- 4) Investasi yang besar dalam proyek padat modal dibandingkan dengan investasi padat karya sehingga pengangguran bertambah
- 5) Rendahnya mobilisasi sosial
- 6) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
- 7) Memburuknya nilai tukar bagi negara-negara berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidaklestarian permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara berkembang
- 8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain

2.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter-region income gap*). Kemiskinan relatif merupakan ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan, biasanya terkait dengan ukuran dibawah tingkat rata-rata distribusi pendapatan nasional. Penanggulangan kemiskinan merupakan inti dari semua masalah pembangunan dan bagi banyak orang pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama dari kebijakan pembangunan (Fir, 2018).

Pengertian mengenai arti dari kemiskinan sangatlah beragam, keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut telah merambat pada level multidimensional, artinya kemiskinan berkaitan satu sama lain dengan berbagai macam dimensi kebutuhan manusia. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan (Febriyani, 2022).

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dari munculnya Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. Kemiskinan bisa dipandang sebagai suatu hal yang absolut dan juga relatif (Atmodjo, 2021).

Kemiskinan digunakan sebagai salah satu indikator dalam menilai hasil pembangunan. tingkat kemiskinan di masing-masing wilayah yang mengalami Pembangunan yang baik atau buruk. Pembangunan suatu daerah wilayah akan memiliki pengaruh positif dan negative bagi wilayah lain. Untuk mengurangi kesenjangan regional perlu adanya perpindahan pelopor Pembangunan dari suatu daerah atau wilayah ke wilayah lainnya. Dengan berpindahnya perusahaan dan aktivitas ekonomi dari suatu ke wilayah ke wilayah lainnya akan menyebarkan ekspansi kumulatif dari suatu wilayah (Anggi Kurnianingsih, 2021).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pengukuran yang digunakan BPS didasarkan pada garis kemiskinan, yaitu ambang pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk hidup layak. Definisi ini bersifat kuantitatif dan menjadi dasar kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, pandangan ini masih terbatas pada aspek ekonomi semata.

Kemiskinan menjadi salah satu penyakit dalam perekonomian suatu negara, terlebih lagi pada negara-negara yang masih berkembang atau negara ketiga, dimana masalah kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional. Kemiskinan bersifat kompleks artinya kemiskinan tidak muncul secara mendadak, namun memiliki latar belakang yang cukup panjang dan rumit sehingga sangat sulit untuk mengetahui akar dari masalah kemiskinan itu sendiri, sedangkan kemiskinan bersifat multidimensional artinya melihat dari banyaknya kebutuhan manusia yang bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki aspek primer berupa kemiskinan akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan, serta aset sekunder berupa kemiskinan akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi.

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Laksani, 2020). Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai “ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum”. Kebutuhan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tersebut meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: (1) terpenuhinya kebutuhan pangan; (2) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan; (3) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan; (4) hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik (Bappenas, 2024).

Sharp, et al (1996) dalam Mudrajat Kuncoro (2020) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

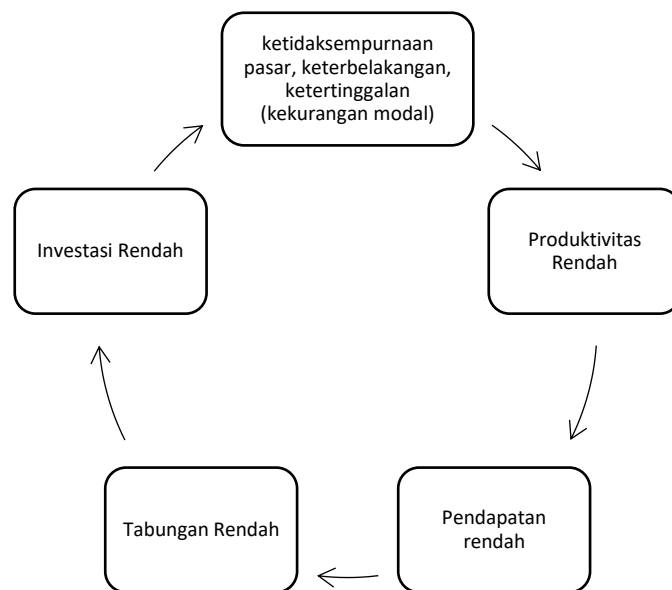
Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse (1953), yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*”(Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Oleh karena itu, setiap usaha untuk mengurangi kemiskinan seharusnya diarahkan untuk memotong lingkaran dan perangkat kemiskinan ini (Kuncoro, 2020). Berikut gambar lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*).

Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (Kuncoro, 2020). Penetapan perhitungan garis masyarakat adalah kemiskinan masyarakat dalam yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari.

Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lahan bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai), BPS (2020).

Lingkaran paradigma kemiskinan merupakan gambaran hubungan kausalitas yang tak terbatas, sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut; pendapatan masyarakat domestik yang rendah dikarenakan produktifitas yang rendah mengakibatkan semakin meningkatnya kemiskinan, kemiskinan yang semakin meningkat menyebabkan tingkat tabungan domestik menjadi rendah, rendahnya tingkat tabungan domestik akan menyebabkan tingkat investasi domestik menjadi rendah, modal domestik yang mengalir menjadi rendah dalam suatu daerah mengakibatkan dalam suatu daerah kekurangan modal. Hal ini mengakibatkan penurunan pada tingkat produktifitas domestik menjadi rendah, sehingga menyebabkan pendapatan domestik menjadi rendah dan begitu pula seterusnya sehingga terbentuknya lingkaran kemiskinan seperti pada Gambar 2.1.

Sumber: Nurkese dalam Mudrajad Kuncoro (2020)



Gambar 2.2 Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*)

Menurut Nasikun dalam Endrayani & Ni Ketut (2015), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. *Policy induces processes*, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan.
2. *Socio-economic dualisme*, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population growth*, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedangkan pertumbuhan pangan seperti deret hitung.
4. *Resources management and the environment*, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
5. *Natural cycle and processes*, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
6. *The marginalization of woman*, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
7. *Cultural and ethnic factors*, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan..
8. *Exploitative intermediation*, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.
9. *Internal political fragmentation and civil strife*, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *International processes*, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

Miller (Frizkilanov, 2021) berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya dari pada lingkungan orang yang bersangkutan. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (Mardikanto, 2019).

Kemiskinan memang merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kondisi kemiskinan setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: Pertama, rendahnya taraf pendidikan dan kesehatan berdampak pada keterbatasan dalam pengembangan diri dan mobilitas. Hal ini berpengaruh terhadap daya kompetisi dalam merebut atau memasuki dunia kerja. Kedua, rendahnya derajat kesehatan dan gizi berdampak pada rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan selanjutnya akan mengurangi inisiatif. Ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan semakin memperburuk kemiskinan. Dengan bekerja setidaknya membuka kesempatan untuk mengubah nasibnya. Keempat, kondisi terisolasi (terpencil) mengakibatkan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tidak dapat menjangkaunya. Kelima, ketidak stabilan politik berdampak pada ketidak berhasilan kebijakan *pro-poor*. Berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan akan mengalami kesulitan dalam implementasi jika tidak didukung oleh kondisi politik yang stabil (Astuti, 2018).

Friedmann (1979) juga menambahkan dimensi struktural dalam memahami kemiskinan. Menurutnya, kemiskinan terjadi karena tidak adanya akses terhadap kekuasaan, pengetahuan, dan sumber daya produktif. Artinya, kemiskinan disebabkan oleh ketimpangan distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan hanya akibat dari malas bekerja atau kurangnya usaha individu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem sosial dan ekonomi yang tidak adil.

Kemiskinan dan ketimpangan pembangunan layaknya satu unsur yang tak dapat dipisahkan. Kemiskinan ada diakibatkan karena adanya ketimpangan sosial dalam suatu Negara. Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan memiliki pengaruh yang negatif, yaitu di mana ketika tingkat kemiskinan meningkat maka akan meningkatkan pula disparitas ekonomi yang akan terjadi. Ketimpangan sosial adalah masalah serius terutama di daerah berkembang, karena ketimpangan pembangunan adalah cikal bakal terbentuknya kemiskinan serta berbagai macam masalah sosial yang penanganannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Oleh karena itu pembangunan yang merata hendaknya harus segera terealisasi sehingga menimbulkan kesenjangan antar daerah (ADLI, 2018).

Sen dalam (Todaro, M., & Smith, 2021), berpendapat bahwa masalah kemiskinan tidak hanya masalah income semata melainkan terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah akses akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian penanganan kemiskinan komprehensif. Menurut akan lebih Todaro dalam (Syaputra, 2020) melihat kemiskinan dari dua sisi yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut kemiskinan merupakan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Namun demikian, antara negara yang satu dengan lainnya memiliki garis kemiskinan yang berbeda.

Garis kemiskinan absolut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di suatu negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US \$ 1 atau \$ 2 per hari dalam dolar PPP (*Purchasing Power Parity*).

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

2.1.3 Pengertian dan Klasifikasi Infrastruktur

Menurut Torrisi (2019), konsep infrastruktur masih bersifat relatif dan belum memiliki definisi yang bersifat universal atau baku dalam literatur ekonomi maupun pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap infrastruktur dapat bervariasi tergantung pada pendekatan analisis dan konteks kebijakan yang digunakan. Sementara itu, Tinbergen (2020) mencoba memberikan klasifikasi dengan membedakan antara infrastruktur yang mencakup elemen-elemen seperti pembangunan jalan, sistem pendidikan, dan layanan dasar lainnya dengan suprastruktur, yang mencakup aktivitas-aktivitas produktif seperti sektor manufaktur, pertanian, dan pertambangan.

Namun demikian, meskipun perbedaan tersebut memberi arah terhadap pemahaman konseptual, Tinbergen tidak secara eksplisit memberikan definisi formal maupun referensi teoritis yang komprehensif mengenai kedua istilah tersebut. Dengan demikian, meskipun upaya pengkategorian telah dilakukan, perumusan teoritis mengenai pengertian infrastruktur dan suprastruktur masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat dijadikan acuan dalam studi-studi pembangunan yang bersifat empiris maupun konseptual.

Tinbergen (2020) membedakan infrastruktur dalam dua jenis berdasarkan dampaknya secara langsung atau tidak langsung terhadap pembangunan ekonomi, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi secara langsung mendukung kegiatan produksi, misalnya: jalan, bandara, pelabuhan, jaringan limbah, jaringan pipa air bersih, jaringan listrik dan irigasi, sedangkan infrastruktur sosial dibangun untuk kenyamanan sosial dan dibangun dalam rangka mendukung produktivitas ekonomi, seperti : sekolah, rumah sakit, gedung olahraga dan lain-lain (HUMANTITO, 2019).

Dari sudut pandang ekonomi, juga dikemukakan bahwa infrastruktur mempunyai dua kriteria yaitu 1) infrastruktur sebagai *capital good* dan 2) infrastruktur sebagai *public good*. Sebagai *capital good*, infrastruktur mempunyai kriteria: bersumber dari pengeluaran investasi, berjangka panjang, secara teknis tidak dapat dibagi-bagi (*technical indivisibility*) dan mempunyai rasio capital-output yang tinggi. Sebagai *public good*, infrastruktur mempunyai kriteria barang yang konsumsinya tidak bersifat not excludable dan not rival (Torrissi, 2019).

Aschauer (2021) membedakan infrastruktur berdasarkan peranannya dalam pembentukan modal untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu infrastruktur inti dan non-inti. Infrastruktur inti adalah jalan, bandara, transportasi umum, jaringan listrik dan gas, jaringan pipa air bersih.

Infrastruktur jaringan merujuk pada jalan, rel kereta api, saluran air, jaringan komunikasi, jaringan air dan jaringan listrik. Sedangkan infrastruktur nucleus merujuk pada sekolah rumah sakit dan museum. Pembedaan ini didasarkan pada tingkat ketidak bergerakan (*immobility*), ketidak terpisahan (*indivisibility*), ketidak saling berhubungan (*not-interchangeability*) dan fitur multimanfaat (Torrissi, 2019).

Uraian pengertian dan klasifikasi infrastruktur diatas berkesesuaian dengan empat komponen infrastruktur yang sangat signifikan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar menurut Marwan (2022). Empat komponen dasar tersebut adalah (1) transportasi, meliputi jalan, *highways*, *railroads*, transportasi masyarakat, bandara, transportasi laut, jalur sepeda, sidewalks, jalur-jalur hijau; (2) *public utilities*, meliputi listrik, gas, pasokan air, pembuangan, telepon, radio dan televisi,

(3) *public services*, meliputi pelayanan pemadam kebakaran, *flood protections*, sekolah, jasa kesehatan seperti rumah sakit, perpustakaan publik, *waste management*, (4) *national service*, meliputi pertahanan, sistem perbankan dan moneter, sistem pos, *frequency allocation* (Kindangen, 2019).

Kwik Kian Gie (2022) membedakan infrastruktur ekonomi dengan infrastruktur pemukiman. Pengertian infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik dan jasa layanan yang diperoleh darinya untuk memperbaiki produktivitas ekonomi dan kualitas hidup seperti transportasi, telekomunikasi, kelistrikan, dan irigasi. Sedangkan infrastruktur permukiman adalah infrastruktur yang terdiri dari infrastruktur fisik dan layanan yang diperoleh darinya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas hidup seperti air bersih dan perumahan.

Dari uraian diatas dapat disarikan bahwa infrastruktur dapat bersifat fisik maupun non fisik. Infrastruktur fisik dapat berupa jaringan maupun nucleus. Pada umumnya infrastruktur bersifat barang publik, pengadaannya memerlukan biaya tetap yang sangat besar sehingga investasinya dilaksanakan dalam jangka panjang. Berbagai jenis infrastruktur fisik pada umumnya saling berkaitan dan dapat dimanfaatkan bila didukung dengan infrastruktur lainnya.

Infrastruktur merupakan prakondisi bagi terciptanya pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dan sangat penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat. Infrastruktur non fisik merujuk pada modal manusia dan aspek kelembagaan dalam masyarakat. Pengertian ini juga dikemukakan oleh Kodoatie (2019) yang mengutip PASARIBU, 2016 yaitu bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan sekonomi.

Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (PASARIBU, 2016).

Sementara itu, Oscar Lewis memperkenalkan konsep *budaya kemiskinan*, yang menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berakar pada aspek material, tetapi juga mencakup pola pikir, nilai, dan gaya hidup yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam pandangan ini, kemiskinan bisa menjadi siklus yang terus berlangsung, karena generasi berikutnya tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung mobilitas sosial. Pola hidup ini menciptakan keterbatasan dalam membangun aspirasi, motivasi, dan kemampuan untuk keluar dari kemiskinan.

2.1.4 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan (Makmuri, 2017). Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut: (a) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; (b) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai; dan (c) Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, maupun pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat (Lesmana, 2017). Hal ini berakibat semakin tingginya pengeluaran pemerintah maka diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan di masyarakat (Astary, 2024).

Pengeluaran Pemerintah adalah semua bentuk belanja atau pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjalankan fungsi-fungsinya, seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan subsidi. Pengeluaran ini menjadi alat penting dalam kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta menyeimbangkan distribusi pendapatan.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui belanja negara, pemerintah membiayai berbagai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, serta pemberian subsidi kepada masyarakat. Pengeluaran ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu belanja rutin untuk operasional pemerintahan dan belanja modal untuk investasi pembangunan jangka panjang.

Dengan alokasi yang tepat, pengeluaran pemerintah dapat mempercepat pembangunan, mengurangi angka kemiskinan, dan memperkecil ketimpangan pendapatan antarwilayah. Namun, jika tidak dikelola secara efisien dan transparan, pengeluaran ini dapat menimbulkan defisit anggaran dan ketidakefisienan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan belanja negara yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Aktivitas Utama dalam kegiatan fiskal adalah pengelolaan pendapatan serta pengeluaran/belanja pemerintah. Banyak teori yang mengupas perpajakan, namun tidak demikian halnya dengan pengeluaran pemerintah beserta alokasinya. Pemerintah sebagai produsen atau penyedia barang public harus mampu memproduksi barang public yang efisien (Kristin, 2018). Dengan demikian, jenis-jenis belanja pemerintah yang menggambarkan aktivitas pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengeluaran yang Habis Terpakai

Pengeluaran ini berhubungan dengan pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang habis pakai baik bersifat modal (investasi sektor public berupa jalan, sekolah, rumah sakit, dll).

Pengeluaran jenis ini menggunakan sumber daya yang ada dalam perekonomian. Pengertian ini mendasari prinsip *crowding out*. Menurut Keynes, *crowding out* hanya dapat terjadi pada kondisi *full employment*, yaitu apabila terjadi kenaikan pengeluaran public sebesar Rp 1, ini merupakan pendapatan terhadap sektor non public.

2. Transfer (Transfer Expenditure)

Pengeluaran ini meliputi pengeluaran public atas dana pensiun, subsidi, bunga hutang, dana korban PHK, dll. Tapi pengeluaran ini tidak menggambarkan permintaan pemerintah akan tenaga kerja sebagaimana pengeluaran sebelumnya.

2.1.5 Investasi

Investasi definisikan sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah baran-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dimasa depan (Waruwu, 2023). Dengan kata lain dalam teori ekonomi, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian.

Secara umum investasi meliputi pertambahan barang dan jasa dalam masyarakat seperti pertambahan mesin-mesin baru, pembuatan jalan baru, lahan baru, perusahaan-perusahaan baru, dan sebagainya. Investasi tidak hanya untuk memaksimalkan output tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Menurut Noor (2015), investasi adalah kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumber daya (resources) saat ini (sekarang), dengan harapan mendapatkan manfaat dikemudian hari (masa datang). Untuk memudahkan pengertian dan perhitungan, sumber daya (resources) ini biasanya diterjemahkan (dikonversi) menjadi satuan moneter atau uang. Dengan demikian, secara konsep, investasi dapat didefinisikan sebagai menanamkan uang sekarang untuk mendapatkan manfaat (balas jasa atau keuntungan) dikemudian hari.

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua, yaitu: investasi pada financial assets dan investasi pada real assets. Investasi pada financial assets dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan

lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi dan lainnya. Sedangkan investasi pada real assets diwujudkan dalam bentuk pembelian assets produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya (Halim, 2018).

Dengan adanya investasi, suatu negara dapat mengembangkan produk-produk barang dan jasa yang bernilai sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Terserapnya tenaga kerja pada lapangan pekerjaan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, masyarakat sendiri akan mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, perkembangan investasi dapat mengurangi jumlah masyarakat berada dibawah garis kemiskinan (Wati, 2015).

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 1) investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, 2) Investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sector swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau di sebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula permintaan efektif (*effective demand*) (Waruwu, 2023).

Dalam perspektif ekonomi, investasi merupakan aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh berbagai pelaku ekonomi, termasuk individu, badan usaha, maupun institusi pemerintah. Bentuk investasi sangat beragam, mulai dari akuisisi aset finansial seperti saham dan obligasi, pembangunan infrastruktur publik, hingga pendirian unit usaha baru yang bersifat produktif.

Peran investasi sangat vital dalam mendorong dinamika pertumbuhan ekonomi, karena melalui aktivitas ini tercipta berbagai efek positif, seperti peningkatan kesempatan kerja, penguatan kapasitas produksi, dan peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Terdapat dua jenis investasi utama, yaitu

investasi domestik (dalam negeri) dan investasi asing (penanaman modal asing/foreign direct investment). Bagi negara berkembang, seperti Indonesia, investasi menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi, terutama jika diarahkan ke sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, dan infrastruktur

Pengaliran iklim investasi di Indonesia dimulai dengan diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Undang-Undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pemberlakuan kedua undang-undang ini menyusul tampilnya rezim orde baru memegang tampuk pemerintahan. Sebelumnya, dalam pemerintahan orde lama, Indonesia sempat menentang kehadiran investasi dari luar negeri. ketika itu tertanam keyakinan bahwa modal asing hanya akan menggerogoti kedaulatan negara. Kedua Undang-Undang tadi kemudian dilengkapi dan disempurnakan pada tahun 1970. UU No. 1 Tahun 1967 Tentang PMA disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 1968 tentang PMDN disempurnakan dengan UU No.12 Tahun 1970.

Menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung, menanggung resiko penanaman modal tersebut. Undang-undang republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal sebagai pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing menyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal)

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967/ o. 11 Tahun 1970 tentang PMA dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968/ No. 12 Tahun 1970 tentang PMDN, investasi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. walaupun demikian, pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan. kecenderungan peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh kalangan

masyarakat atau sektor swasta, baik PMDN maupun PMA, namun juga penanaman modal oleh pemerintah. Ini berarti pembentukan modal domestik bruto meningkat dari tahun ke tahun (Waruwu, 2023)

Melalui investasi, modal dialirkan ke berbagai sektor produktif seperti industri, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur. Dalam jangka panjang, investasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas basis pajak negara. Investasi tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), yang membawa manfaat tambahan seperti transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun, keberhasilan investasi sangat bergantung pada iklim usaha yang kondusif, ketersediaan infrastruktur yang memadai, serta kebijakan pemerintah yang mendukung kepastian hukum dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor agar investasi dapat tumbuh dan berdampak positif terhadap pembangunan nasional.

Menurut Noor (2015), menurut jenisnya investasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

- a) Investasi langsung (direct investment), adalah investasi pada faktor produksi yang menghasilkan aneka barang dan jasa untuk keperluan konsumsi masyarakat, atau dikenal juga dengan investasi pada sektor riil.
- b) Investasi tidak langsung (indirect investment), adalah investasi yang bukan pada faktor produksi, melainkan pada sektor keuangan (financial investment), seperti deposito, beli saham, obligasi, dan sejenisnya, yang menghasilkan jasa keuangan, seperti deposito, beli saham, beli obligasi, reksadana, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), dan investasi pada surat berharga lainnya.

Menurut Halim (2018) pendekatan serba-organisasi industrial kepada investasi luar negeri langsung tidak menguraikan mengenai apa dan bagaimana ketidaksempurnaan pasar dapat mengarah ke pengambilan keputusan

mengeksploitasikan keuntungan dengan melakukan investasi luar negeri langsung bukan menjual, menyewakan, atau mengizinkan penggunaan keuntungan, atau mengekspor 'barang' yang mempunyai keunggulan itu.

Penjelasan umum mengenai peranan ketidaksempurnaan pasar dalam pengambilan keputusan melakukan investasi dilengkapi dengan pengkajian-pengkajian yang telah memperluas dalil Coase dengan kegiatan-kegiatan perusahaan multinasional. Pengkajian-pengkajian ini melihat investasi langsung sebagai hasil keputusan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk menginternalisasikan biaya-biaya transaksi (di dalam perusahaan) karena ketidaksempurnaan pasar barang-barang akhir menengah (misalnya bahan mentah setengah diproses dan pengetahuan tergabung dalam modal paten dan tenaga kerja).

Investasi asing digunakan definisi dari *IMF Balanced of Payments Manual*, juga digunakan oleh Bank Indonesia. Definisi tersebut adalah Investasi langsung mengacu pada investasi untuk memperoleh manfaat yang cukup lama dari kegiatan perusahaan dalam suatu perekonomian diluar tempat penanaman modal tersebut. sementara tujuan penanam modal adalah untuk memperoleh pengaruh secara efektif dalam pengelolaan perusahaan tersebut. Istilah manfaat yang cukup lama tersebut merupakan investasi yang pelaksanaannya memerlukan sedikit pengawasan. Dalam definisi tersebut tidak termasuk investasi portofolio (Wati, 2015).

Meskipun bukan satu-satunya sumber utama, peran investasi asing tetap memiliki signifikansi tersendiri dalam pembangunan ekonomi, setidaknya karena dua alasan utama. Pertama, dalam konteks investasi internasional, banyak negara secara aktif berupaya menghindari ketergantungan yang berlebihan terhadap satu negara investor atau kelompok negara tertentu. Upaya diversifikasi ini tidak semata-mata dilatarbelakangi oleh pertimbangan politik, semangat nasionalisme, atau kekhawatiran terhadap potensi intervensi asing yang bersifat strategis, melainkan juga didorong oleh pertimbangan ekonomi yang substansial. Ketergantungan terhadap satu sumber investasi tertentu dapat menciptakan kerentanan struktural dalam perekonomian, terutama jika terjadi perubahan kebijakan luar negeri atau dinamika geopolitik dari negara asal investor.

Selain itu, dominasi investor asing dari satu negara juga dapat menghambat kompetisi sehat dan mereduksi kapasitas domestik dalam merumuskan arah pembangunan nasional secara independen. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dan keberagaman sumber investasi asing menjadi langkah strategis dalam memastikan stabilitas ekonomi, kemandirian pembangunan, dan perlindungan terhadap kepentingan jangka panjang suatu negara. Keragaman sumber investasi asing menambah arus informasi tentang teknologi dan pasar luar negeri, dan dengan demikian mendapatkan kekuatan tawar-menawar bagi pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara dengan penerima.

Alasan kedua, saat ini, menurut pengamatan sementara kalangan, ada kecenderungan perbedaan perilaku para penanam modal asing dari berbagai negara. Hal tersebut termasuk faktor-faktor seperti kecendrungan perusahaan untuk mengeksport, memasuki usaha-usaha patungan, dan mengalihkan serta menyesuaikan teknologi. Hal ini merupakan suatu pengamatan yang relatif baru, terutama karena modal para eksportir yang cukup besar di antara ekonomi pasa sebelum tahun 1970 hampir seluruhnya dari Amerika Serikat dan sebagian kecil dari negara-negara Eropa (Halim, 2018).

Menurut Noor (2015), investasi dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan masyarakat, yaitu baik individu, kelompok, bahkan negara. Dengan demikian, investasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa sumber nafkah atau pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukannya. Investasi juga menghasilkan nilai tambah, yang merupakan balas jasa produksi, sekaligus sebagai sumber pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.

2.1.6 Konsep Kebijakan Pemerintah

Pada hakikatnya, kebijakan pemerintah merupakan keputusan pemerintah yang diperuntukkan bagi publik dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan bersama. Kebijakan pemerintah diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan memecahkan masalah yang ada di suatu negara. Kebijakan pemerintah tentunya perlu diimplementasikan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap

dalam kebijakan, sekaligus variabel yang paling penting dan memiliki pengaruh yang besar bagi keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian masalah yang ada (Situmorang dalam Permatasari, 2020). Implementasi kebijakan pemerintah salah satunya dapat dilihat dari realisasi pengeluaran pemerintah.

Abdoellah & Rusfiana (2019) menyebutkan bahwa domain kebijakan publik meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, perdagangan, dan transportasi. Terdapat beberapa ciri-ciri kebijakan pemerintah publik yaitu kebijakan pemerintah publik merupakan tindakan yang memiliki tujuan dan direncanakan, kebijakan tidak hanya pada membuat undang-undang tapi juga harus berkaitan dengan implementasi, kebijakan diikuti oleh tindakan konkret, dan pada kebijakan pemerintah publik ini campur tangan pemerintah bisa diikutsertakan maupun tidak.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan bagian dari upaya perlindungan terhadap pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum. UMP ditetapkan setiap tahun oleh gubernur masing-masing provinsi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan, yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Penetapan UMP juga mengacu pada formula yang ditentukan dalam regulasi pemerintah, antara lain mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta produktivitas tenaga kerja.

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) bertujuan untuk mencapai keseimbangan yang adil antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha. Kebijakan ini dirancang guna melindungi pekerja dari praktik eksploitasi, menjamin tingkat upah yang layak, serta menjaga daya beli masyarakat sebagai salah satu komponen penting dalam mendorong stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan adanya UMP yang ditetapkan secara memadai dan rasional, diharapkan kualitas hidup para pekerja dapat meningkat, yang pada gilirannya akan memperkuat kontribusi mereka terhadap produktivitas dan pembangunan ekonomi yang bersifat inklusif. Namun demikian, implementasi kebijakan UMP kerap kali memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama di kalangan dunia usaha.

Tujuan dari kebijakan UMP adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha, mencegah eksploitasi tenaga kerja, dan menjamin daya beli masyarakat. Dengan UMP yang memadai, diharapkan taraf hidup pekerja dapat meningkat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, kebijakan ini sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika kenaikan UMP dianggap memberatkan dunia usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oleh karena itu, dalam menetapkan UMP, pemerintah dituntut untuk bersikap adil dan memperhatikan kondisi ekonomi daerah agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketimpangan atau menghambat penciptaan lapangan kerja.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Hubungan Infrastruktur dengan Ketimpangan Pendapatan

Infrastruktur merupakan faktor yang mendukung terjadinya pemerataan. Menurut teori Neo-Klasik dimana pada mula pertumbuhan pembangunan infrastruktur masih belum merata sehingga menyebabkan ketimpangan. Todaro (2016) menyatakan tingkat tersedianya infrastruktur disuatu negara merupakan faktor penting serta menentukan derajat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Nantinya saat pertumbuhan ini berlanjut pembangunan infrastruktur juga akan mengalami pemerataan yang diikuti pemerataan pendapatan yang mengurangi ketimpangan (Tsamara, 2021).

Dalam menghadapi ketimpangan, infrastruktur berperan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi pembangunan infrastruktur memungkinkan terjadinya perluasan pemerataan pendapatan dengan meningkatkan aksesibilitas penduduk, di sisi lain pembangunan infrastruktur yang tidak terkonsentrasi meningkatkan kemungkinan terjadinya ketimpangan (Chotia, 2017). Sukwika (2018) dalam penelitiannya mengenai peran infrastruktur terhadap disparitas ekonomi antar wilayah Indonesia, ketimpangan ekonomi di Indonesia utamanya diasosiasikan dengan ketimpangan infrastruktur. Semakin tinggi ketimpangan pembangunan infrastruktur di suatu wilayah semakin tinggi pula tingkat ketimpangan ekonomi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muljono (2010) mengkaji pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap pendapatan tenaga kerja, baik dalam konteks intra-wilayah maupun antarwilayah, khususnya antara kawasan Barat dan Timur Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan tenaga kerja. Namun, besarnya dampak tersebut tidak bersifat seragam di seluruh wilayah, melainkan menunjukkan variasi yang signifikan antar daerah. Hal ini mencerminkan bahwa manfaat ekonomi dari infrastruktur sangat dipengaruhi oleh kondisi lokal, seperti tingkat keterpaduan ekonomi wilayah, aksesibilitas pasar, serta ketersediaan faktor produksi yang mendukung.

Implikasi dari temuan tersebut mempertegas pentingnya pendekatan pembangunan yang bersifat kontekstual dan memperhatikan ketimpangan regional. Infrastruktur memang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh sejauh mana pembangunan tersebut mampu mengintegrasikan daerah-daerah yang tertinggal ke dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan infrastruktur perlu dirancang secara menyeluruh dengan memperhatikan disparitas antarwilayah agar dampak positifnya terhadap pendapatan masyarakat dapat dirasakan secara merata.

2.2.2 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Pendapatan

Pengeluaran pemerintah memiliki kaitan erat dengan upaya mengurangi disparitas pendapatan antarwilayah, khususnya dalam kerangka kebijakan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tujuan utama dari penerapan desentralisasi adalah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar daerah. Melalui desentralisasi, setiap pemerintah daerah memperoleh otonomi dalam mengatur dan mengelola kepentingan daerahnya, termasuk dalam menentukan arah dan prioritas pengeluaran daerah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan bagian dari sistem keuangan negara secara keseluruhan.

Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan daerah dapat lebih responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Hal ini dilakukan melalui mekanisme transfer fiskal dari pemerintah pusat kepada daerah serta pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan sumber daya lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Sesuai peran pemerintah dalam perekonomian, pemerintah memiliki peran stabilisasi, peran alokasi, peran distribusi, dan peran dinamisasi. Begitupun pengeluaran daerah harus berlandaskan pada peran-peran tersebut (Rahmawati, 2022). Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat dapat meningkatkan tingkat ketidakmerataan pendapatan masyarakat di Indonesia.

Apabila temuan tersebut dibandingkan dengan teori makro terkait pengeluaran pemerintah yang dikemukakan Wagner, teori ini mengemukakan bahwa untuk meningkatkan perekonomian maka pemerintah akan menggunakan pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Dalam hukum Wagner menyatakan bahwa jika pendapatan perkapita meningkat, maka diimbangi dengan peningkatan pengeluaran pemerintah (Rahmawati, 2022). Dari teori tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan pengeluaran pemerintah dapat dijadikan cara untuk meningkatkan pendapatan perkapita.

Dengan meningkatnya pendapatan perkapita, pemerintah mengharapkan perekonomian suatu negara semakin meningkat dan dapat mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan karena kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Namun kenyataannya pemerintah cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan ketimpangan (Yustika Sabir, 2015)

Pengelolaan ketimpangan pendapatan sangat perlu dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa adanya pemerataan pembangunan dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Perbedaan sumber daya dan pola hidup pada setiap daerah adalah salah satu pengaruh terjadinya gap pada pendapatan yang diterima masing-masing golongan masyarakat. Hal ini didukung penelitian dari Ranifial Anugra, Taufiq Marwa (2016) dalam penelitiannya pengeluaran pemerintah

juga mempunyai hasil yang berpengaruh positif signifikan pada ketimpangan pendapatan karena alokasi pengeluaran pemerintah ini cenderung berfokus pada daerah-daerah maju sehingga terjadilah ketimpangan atau tidak seimbangnya antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Namun demikian, efektivitas pengeluaran pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan sangat bergantung pada kapasitas perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Tanpa tata kelola yang baik, alokasi anggaran justru berisiko tidak merata atau tidak menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk terus memperkuat sistem pengawasan, evaluasi, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar pengeluaran pemerintah benar-benar dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan antar wilayah.

2.2.3 Hubungan Kebijakan Pemerintah dengan Ketimpangan Pendapatan

Salah satu teori utama yang menjadi dasar kebijakan ini adalah *Living Wage Theory* atau teori kebutuhan hidup layak. Teori ini menekankan bahwa upah yang diterima oleh pekerja harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Dalam praktiknya, UMP dihitung dengan memperhatikan komponen kebutuhan hidup layak (KHL) yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi di masing-masing daerah.

Selain itu, teori upah minimum juga menjelaskan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mencegah praktik pemberian upah di bawah standar yang dapat merugikan pekerja, terutama di sektor informal dan buruh tidak terampil. Meskipun demikian, teori pasar tenaga kerja klasik memandang penetapan upah minimum secara skeptis karena dianggap dapat menciptakan ketidakseimbangan pasar tenaga kerja, seperti meningkatnya pengangguran. Sementara itu, *Efficiency Wage Theory* memberikan pandangan yang lebih positif, di mana upah yang layak justru dapat meningkatkan produktivitas dan loyalitas pekerja.

Oleh karena itu, dalam menetapkan UMP, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap pekerja dan keberlanjutan usaha, agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kebijakan pemerintah punya peran sentral dalam mengatur distribusi pendapatan di masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat (progresif, inklusif, dan berkeadilan), ketimpangan bisa dikurangi. Tapi jika kebijakan bias terhadap kelompok tertentu (misalnya elite ekonomi), ketimpangan akan makin parah.

Menurut teori redistribusi (*Redistribution Theory*), yang menyatakan pemerintah bertugas mengurangi ketimpangan melalui redistribusi pendapatan, terutama dari golongan kaya ke golongan miskin. Teori ini menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi untuk mendistribusikan kembali kekayaan demi tercapainya keadilan sosial.

Melalui pajak progresif dan program jaminan sosial, pendapatan dari kelompok berpenghasilan tinggi dapat digunakan untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah. John Rawls, dalam *Theory of Justice*, menekankan pentingnya prinsip “difference”, yaitu kebijakan harus menguntungkan pihak yang paling lemah. Ketimpangan pendapatan merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, sehingga membutuhkan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis keadilan. UMP ditetapkan sebagai batas minimum upah yang wajib dibayarkan oleh pemberi kerja, dengan tujuan menjamin pendapatan minimum yang layak bagi pekerja.

Penetapan UMP yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin serta mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana kebijakan UMP mampu menjadi alat efektif dalam menekan ketimpangan pendapatan di berbagai daerah di Indonesia. Kebijakan UMP didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok pekerja berpendapatan rendah yang rentan terhadap eksploitasi.

Melalui penetapan upah minimum yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing provinsi, pemerintah berupaya menciptakan standar penghasilan yang dapat menjamin kebutuhan dasar pekerja. Dalam jangka panjang, peningkatan UMP secara bertahap diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kelompok pendapatan bawah dan atas.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kenaikan UMP dapat meningkatkan daya beli pekerja serta menstimulasi konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak selalu merata di seluruh wilayah. Di provinsi dengan tingkat produktivitas rendah atau struktur ekonomi yang masih didominasi sektor informal, penerapan UMP yang tinggi justru dapat memicu pengurangan tenaga kerja atau mendorong praktik kerja tanpa kontrak.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dampak kebijakan upah minimum provinsi (UMP) terhadap dinamika ketenagakerjaan dan distribusi pendapatan, maka pelaksanaannya perlu didukung oleh serangkaian kebijakan komplementer yang saling terintegrasi. Penerapan UMP secara mandiri tanpa dukungan kebijakan tambahan berisiko menimbulkan distorsi dalam pasar tenaga kerja, terutama terhadap sektor informal dan usaha berskala kecil. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UMP dalam mengurangi ketimpangan pendapatan secara berkelanjutan harus diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar.

Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki peran penting dalam upaya mengurangi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan memberikan jaminan pendapatan minimum yang layak, UMP tidak hanya melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga mendorong terciptanya distribusi pendapatan yang lebih adil di tengah masyarakat. Dengan demikian, agar kebijakan ini benar-benar efektif, diperlukan sinergi dengan kebijakan ekonomi lainnya, termasuk peningkatan produktivitas tenaga kerja, perlindungan bagi usaha kecil, serta penguatan pengawasan ketenagakerjaan.

Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan berbagai bentuk insentif bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mereka tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah kewajiban penerapan upah minimum. Dukungan tersebut dapat berupa keringanan pajak, akses pembiayaan yang lebih mudah, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Di sisi lain, pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan juga harus ditingkatkan, guna memastikan bahwa hak-hak pekerja dilindungi secara optimal dan tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan upah minimum. Melalui kombinasi kebijakan yang komprehensif dan sinergis ini, UMP dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen untuk menekan kesenjangan pendapatan sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih adil dan inklusif.

2.2.4 Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Pendapatan

Hubungan Investasi dengan Ketimpangan Pendapatan, Harrod-Domar melalui teori-nya menerangkan adanya hubungan positif antara tingkat investasi dan laju perekonomian, dapat dikatakan kurangnya investasi dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi dan rendah nya pertumbuhan perkapita (Todaro 2006:128). Hal ini dikarenakan tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif, dengan putusnya investasi suatu wilayah akan mengalami ketimpangan karena sumber daya alam kurang bisa dioptimalkan tanpa adanya investasi yang tidak diterima oleh setiap wilayah yang ada.

Harrod - Domar mengartikan pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya ia mengatakan bahwa investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa kenaikan investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang juga disertai dengan disparitaspendapat-anantar lapisan masyarakat, dikarena-kan tidak setiap daerah bisa menerima dana investasi tersebut. Setiap investor akan memberikan kriteria daerah yang menurut para investor memiliki sumber daya alam dan manusia yang memadai agar dapat menguntungkan para investor tersebut (Ariani, 2022).

Melalui penanaman modal di berbagai sektor, investasi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat infrastruktur. Di negara berkembang seperti Indonesia, investasi memiliki peran strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat daya saing nasional.

Pemerintah pun terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai kebijakan, seperti penyederhanaan perizinan, insentif fiskal, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana investasi dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, baik dari sisi makro maupun mikro. Dengan melihat peran penting investasi dalam pembangunan, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan.

Investasi harus diarahkan untuk mendukung ekonomi lokal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Selain itu, transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan menjadi syarat mutlak dalam menciptakan investasi yang sehat. Apabila dikelola dengan tepat, investasi bukan hanya menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi kunci menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan investasi pemda dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena itu perlu bagi pemda untuk menjalankan investasi agar dapat dicapai tujuan. Investasi pemerintahan daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang milik daerah oleh pemerintah yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu Pemendagri 52 tahun 2012 dalam (Nauli, 2019).

Ketepatan arah investasi ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apabila distribusi belum dapat dilakukan secara merata maka kesenjangan pendapatan tetap akan terjadi dan cenderung meningkat. Investasi terbagi ke dalam dua jenis utama,

yaitu investasi domestik dan investasi asing atau Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya berkontribusi terhadap pembentukan modal tetap bruto dan menjadi indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi di sektor strategis seperti industri manufaktur, energi, dan teknologi tidak hanya memperluas peluang kerja tetapi juga membawa transfer pengetahuan dan teknologi. Di sisi lain, investasi publik yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan jalan, pelabuhan, dan infrastruktur digital, menjadi fondasi penting untuk menarik investasi swasta. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait stabilitas regulasi, birokrasi yang lambat, dan disparitas pembangunan antarwilayah. Ketimpangan dalam distribusi investasi dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antar daerah, karena wilayah yang minim investasi cenderung tertinggal dalam hal pertumbuhan dan kesejahteraan.

2.2.5 Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan relatif (Badrudin, 2012). Kemiskinan menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan antara kaya dan miskin semakin timpang. Seperti yang ungkapkan oleh Arsyad (2017) tidak tercapainya pengurangan yang berarti pada angka kemiskinan mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Negara berkembang semakin meningkat. Oleh sebab itu, penurunan kemiskinan sangat diperlukan, agar ketimpangan pendapatan di masyarakat semakin rendah.

Penemuan Syawie juga didukung oleh Afandy, Rantung, & Marashdeh (2017) yang menyatakan bahwa angka kemiskinan yang semakin rendah justru menaikkan ketimpangan, sehingga solusi atau langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan dapat bersifat memihak pada ketimpangan, melainkan dibiarkan ketimpangan semakin naik.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa penafsiran terkait hubungan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Temuan tersebut ada yang berhubungan positif, dan juga berhubungan negatif. Pada penelitian ini diharapkan, tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan (Akhsyim Afandy, Vebryna

Permatasari, 2017). Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan pelayanan publik lainnya. Fenomena ini menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan serta merusak stabilitas sosial.

Adapun beberapa penelitian terkait hubungan pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan sebagai berikut. Dalam penelitiannya, (Syeda Anam Hassan, Khalid Zaman, 2015) menyatakan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan positif antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Syawie (2011) mengungkapkan bahwa pada proporsi tertentu, kemiskinan memang berkaitan dengan kesenjangan. Akan tetapi, kemiskinan yang berkurang bukan berarti akan mengurangi ketimpangan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ditunjukkan untuk mengkaji literatur yang berasal dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk dijadikan sebagai referensi pada penelitian ini, sejumlah jurnal yang berisi publikasi sebelumnya dan telah diakui, sehingga dapat dijadikan referensi dalam mendukung penelitian ini. Penulis membuktikan gambaran sejumlah karya atau penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan penelitian akan dilakukan, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kaulihowa dan Adjasi tahun 2018 dengan judul penelitiannya: *“FDI and income inequality in Africa”*. Hasil penelitian membuktikan bahwa: PMA membantu mengurangi ketimpangan pendapatan di 16 negara Afrika, tapi efeknya akan berkurang ketika PMA semakin meningkat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fuady tahun 2018 dengan judul penelitiannya: *“Teknologi Digital dan Ketimpangan Ekonomi di Indonesia”*. Hasil penelitian membuktikan bahwa: Peningkatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan lebih banyak keuntungan bagi pekerja terampil dan kelompok berpendapatan tinggi daripada bagi pekerja kasar dan kelompok berpendapatan rendah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ashfahani tahun 2019 dengan judul penelitiannya: “Analisis Ketimpangan Pendapatan Per Kapita Antar Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2017”. Hasil penelitian membuktikan bahwa: Terjadi divergensi untuk model konvergensi absolut dan konvergensi untuk model konvergensi bersyarat. Selain itu, ditemukan pengaruh positif dan signifikan dari variabel investasi, angkatan kerja, dan modal manusia, serta pengaruh negatif dan signifikan variabel pekerja komuter terhadap pendapatan per kapita di Indonesia.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Chen dkk tahun 2019 dengan judul penelitiannya: “*The Trend of the Gini Coefficient of China (1978-2010)*”. Hasil penelitian membuktikan bahwa: Percepatan laju urbanisasi berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di China.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Christian Lessman tahun 2019 dengan judul penelitiannya: “*Fiscal decentralization and regional disparity*”. Hasil penelitian membuktikan bahwa: ketimpangan wilayah lebih besar pada negara-negara yang menerapkan sentralisasi dan desentralisasi menggunakan Cross Section. Untuk merubah pada struktur federal dan resiko atas pemusatan.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Humantito tahun 2019 dengan judul penelitiannya: “Analisis Keterkaitan Ketersediaan Infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Hasil penelitian membuktikan bahwa: Ketersediaan infrastruktur berpengaruh negative dan signifikan terhadap persentase penduduk.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Lonca tahun 2020 dengan judul penelitiannya: “Dampak Investasi Infrastruktur terhadap Pertumbuhan ekonomi”. Hasil penelitian membuktikan bahwa: investasi infrastruktur dengan cakupan lokal berdampak positif terhadap pertumbuhan namun tingkat pengembalian investasi (*return on investment*) untuk investasi dengan cakupan nasional tidak signifikan.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Samuel Asumadu Sarkodie dkk tahun 2020 dengan judul penelitiannya: “*Electricity access, human development index, governance and income inequality in Sub-Saharan Africa Energy Report 6*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dengan adanya keterbatasan pada akses listrik, lingkungan dan kebijakan politik akan mempengaruhi kondisi factor social- ekonomi dan pembangunan manusia sehingga akan berdampak erhadap ketimpangan pendapatan

9. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Harun dkk pada tahun 2020 dengan judul: *“Zakat and SDGs: Impact Zakat on Human Development in the Five States of Malaysia International”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: “dengan adanya keterbatasan pada akses listrik, lingkungan dan kebijakan politik akan mempengaruhi kondisi factor social- ekonomi dan pembangunan manusia sehingga akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan di Malaysia”.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Jaime Bonet pada tahun 2020 dengan judul *“Fiscal Decentralization and Regional Income Disparities : Evidence from the Colombian Experience”* dalam penelitian Bonet, digunakan beberapa variable, diantaranya : penerimaan regional, pendapatan provinsi per kapita, dan pendapatan nasional per kapita. Hasil penelitian dari Jaime Bonet menunjukkan bahwa proses desentralisasi fiskal meningkatkan ketimpangan pendapatan regional selama masa analisis.
11. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin dan Musta’in tahun 2020 dengan judul penelitiannya: *“Analisis Determinan Ketimpangan Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta”*. Hasil penelitian membuktikan bahwa: Tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal tidak memiliki pengaruh.
12. Penelitian yang dilakukan oleh Istanti dkk tahun 2021 dengan judul penelitiannya: *“Analysis of Factors Affecting Income Distribution Nequality In Indonesia 2009-2013”*. Hasil penelitian membuktikan bahwa: semua variabel bebas dikatakan mempunyai pengaruh simultan terhadap variabel terikat karena dilihat dari tingkat signifikansinya yaitu angka 0,002 lebih kecil dari 0,005 yang berarti ada pengaruh yang signifikan secara serentak antara

populasi, upah minimum dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia 2009-2013.

13. Penelitian yang dilakukan oleh Hulu dan Wahyuni tahun 2021 dengan judul penelitiannya: “Kontribusi Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia Tahun 2010-2019”. Hasil penelitian membuktikan bahwa: a) Ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. b) Infrastruktur sanitasi, jalan, kesehatan dan listrik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan telekomunikasi tidak. c) PMA dan infrastruktur pendidikan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, tapi tidak untuk TPAK.
14. Penelitian yang dilakukan oleh Ravindra H. Dholakia pada tahun 2021 dengan judul “*Regional Disparity in Economic and Human Development in India*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kausalitas dua arah antara pembangunan manusia dan ekonomi menggunakan *Pooled Regression with Dummy in PCI 8 Year Lag*.
15. Penelitian yang dilakukan oleh Grover dkk pada tahun 2021 dengan judul “*Inequality, unemployment, and poverty impacts of mitigation investment: evidence from the CDM in Brazil and implication for a post 2020 mechanism*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Area dengan aktivitas proyek CDM mengalami peningkatan dalam hasil tersebut, yang tampaknya didorong oleh jenis proyek yang terkait dengan aktivitas sector ‘primer’.
16. Penelitian yang dilakukan oleh Mansyur dkk. tahun 2021 dengan judul penelitiannya: “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.”. Hasil penelitian membuktikan bahwa: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan, investasi berpengaruh negatif dan signifikan, kemudian pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan.
17. Penelitian yang dilakukan oleh Alamanda tahun 2022 dengan judul penelitiannya: “*The Effect of Economic Growth On Income Inequality: Panel*

Data Analysis From Fifty Countries”. Hasil penelitian membuktikan bahwa: Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan sementara rasio pajak berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

18. Penelitian yang dilakukan oleh Colin dan Chambers tahun 2022 dengan judul penelitiannya: *“Regulation and income inequality in the United States”*. Hasil penelitian membuktikan bahwa: Adanya peningkatan 10 persen dalam regulasi federal mengakibatkan peningkatan 0,5 persen dalam ketimpangan pendapatan di Amerika Serikat.
19. Penelitian yang dilakukan oleh Candra Mustika pada tahun 2022 dengan judul *“Kemiskinan Relatif dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Demokrasi dan Sosial di Indonesia”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: melalui aspek kebebasan sipil, aspek hak politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan relatif. Hanya aspek lembaga demokrasi yang tidak berpengaruh signifikan. Begitu juga dengan variabel jumlah tindak pidana berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan relatif. Sedangkan akses informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan relatif. Selanjutnya, ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan hasil regresi data panel dengan model random effect menunjukkan aspek demokrasi baik secara umum melalui indeks variabel demokrasi maupun secara khusus melalui aspek kebebasan sipil, aspek hak politik dan aspek lembaga demokrasi keduanya memiliki pengaruh positif dan negative berdampak signifikan pada ketimpangan distribusi. Pendapatan serta variabel jumlah tindak pidana berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Sedangkan akses informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.
20. Penelitian yang dilakukan oleh candra dkk pada tahun 2023 dengan judul *“Determinants of poverty and income inequality on the islands of Sumatra and Java”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perbandingan tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, berdasarkan data dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera sebesar 10,6% lebih tinggi

dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan di Pulau Jawa yaitu sebesar 8,8%. sedangkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara rata-rata di Pulau Sumatera sebesar 0,327 lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata ketimpangan distribusi pendapatan di Pulau Jawa yaitu sebesar 0,393. Hasil regresi menunjukkan bahwa pada Pulau Sumatera variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan. TPT berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Jumlah penduduk tidak signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Sedangkan hasil regresi pada Pulau Jawa menunjukkan variabel IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan. TPT berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan dan tidak signifikan terhadap ketimpangan. Dan Jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil dari pemaparan di atas, ketimpangan pendapatan di Indonesia mengalami penurunan namun pada akhirnya cenderung meningkat pada tahun berikutnya. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ini terlihat nyata antara berbagai wilayah, khususnya antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Beberapa faktor ekonomi dan kebijakan pembangunan diduga menjadi penyebab utama dari perbedaan distribusi pendapatan antar wilayah.

Infrastruktur merupakan faktor penting mendukung konektivitas dan produktivitas suatu daerah. Infrastruktur diukur melalui panjang jalan yang tersedia di suatu wilayah menjadi indikator utama dalam mengevaluasi tingkat aksesibilitas dan konektivitas. Wilayah dengan jaringan jalan baik cenderung memiliki akses yang mudah ke pasar tenaga kerja, pusat perdagangan, dan infrastruktur publik lainnya, pada gilirannya meningkat kesempatan ekonomi dan pendapatan.

Selain itu, pengeluaran pemerintah berperan besar dalam menciptakan

pemerataan melalui program pembangunan dan bantuan sosial. Namun, efektivitasnya tergantung pada seberapa tepat sasaran dan merata distribusinya. Pengeluaran pemerintah umumnya dialokasikan pada sektor publik yang bermanfaat bagi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Peran pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pendapatan sangatlah dibutuhkan. Dalam menetapkan kebijakan, khususnya dalam hal upah minimum memiliki dampak langsung terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah yang menyampingkan permasalahan ketimpangan pendapatan akan berdampak pada kecemburuan sosial dan juga berimbas pada ketidakstabilan ekonomi.

Faktor lainnya adalah investasi, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi jika hanya terkonsentrasi di daerah maju seperti Pulau Jawa, maka disparitas antarwilayah akan terus berlanjut.

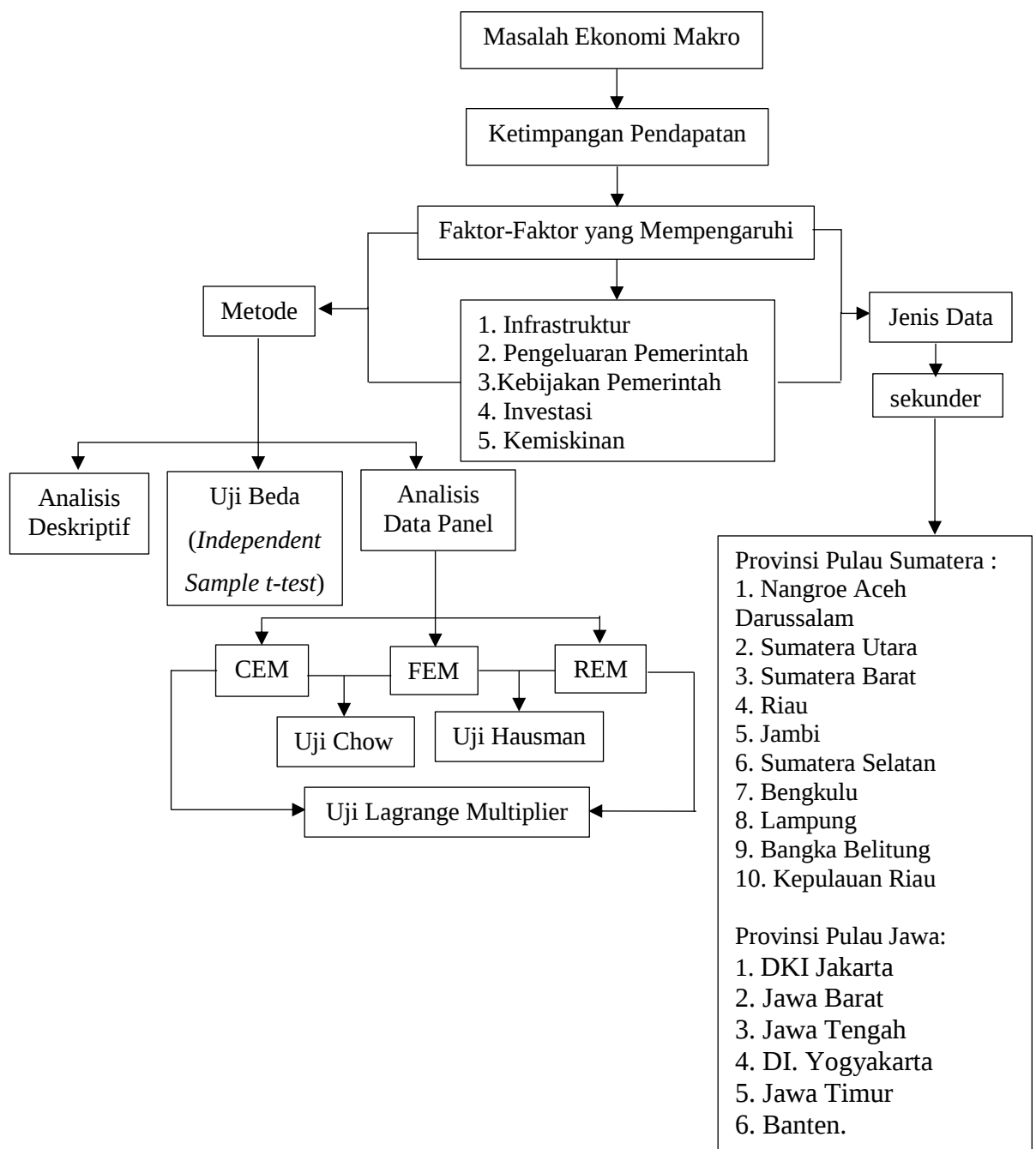
Meningkatnya jumlah penduduk miskin ini dikhawatirkan akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kemiskinan pula. Tingkat kemiskinan di suatu daerah dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar kemungkinan terjadinya kesenjangan pendapatan, terutama jika tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan sosial yang efektif.

Dengan mempertimbangkan lima variabel utama tersebut infrastruktur (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2), kebijakan pemerintah (X_3), investasi (X_4), dan kemiskinan (X_5) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap ketimpangan pendapatan (Y) di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa selama periode tertentu. Penelitian ini didasarkan pada teori ketimpangan (Kuznets).

Pendekatan data panel dipilih karena mampu menangkap dinamika perubahan antar waktu dan perbedaan antar provinsi secara lebih akurat, serta dapat mengontrol heterogenitas individual yang tidak dapat diobservasi secara langsung.

Model yang akan digunakan dievaluasi melalui pemilihan antara Common Effect, Fixed Effect, atau Random Effect, dengan pengujian Hausman, Chow, dan Lagrange Multiplier.

Kerangka berpikir dari penelitian ini di deskripsikan seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan peneliti sebelumnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga Infrastruktur memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
2. Diduga Pengeluaran Pemerintah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
3. Diduga Kebijakan Pemerintah memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
4. Diduga Investasi memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
5. Diduga Kemiskinan memiliki hubungan positif terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.